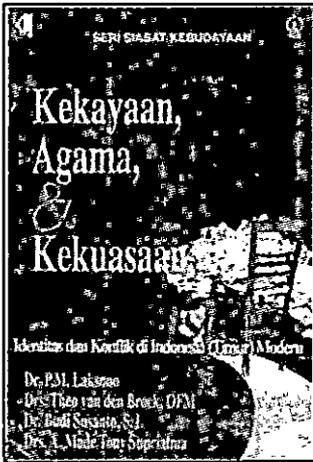


Kritik atas Pembangunan

(sebuah refleksi atas pembangunan
di Kawasan Timur Indonesia)



- Judul Buku : Kekayaan, agama, dan Kekuasaan
Identitas dan Konflik di Indonesia (Timor)
Modern
- Penulis : Dr. P.M. Laksono
Drs. Theo Van Den Broek, OFM
Dr. Budi Susanto, S.J.
Drs. A. Made Tony Supriatma
- PENERBIT : Penerbit Kanisius, Yogyakarta
Lembaga Studi Realino, Yogyakarta.
- Tebal Buku : 154 hlm

Ada suatu ironisme dan keperihan tersendiri tatkala membicarakan nasib Kawasan Timur Indonesia (KTI): berlimpahnya kekayaan alam dan besarnya berbagai perusahaan multinasional yang ada tidak banyak membawa berkah bagi masyarakat setempat. Alih-alih membawa berkah, kekayaan alam, perusahaan multinasional beserta perangkat budaya yang diusungnya seringkali justru menjadi sumber bencana bagi masyarakat setempat. Bahkan sering dikatakan bahwa masyarakat Irian -misalnya- adalah masyarakat yang miskin di atas kelimpahan kekayaan alamnya.

Kesadaran akan besarnya kekayaan alam yang terdapat di Indonesia bagian Timur bukanlah sesuatu yang tanpa bukti.

Bumi Irian Jaya, sebagai salah satu pulau di Indonesia Timur, telah memuntahkan 1.620 ton emas, 3.240 ton perak dan 162 juta ton tembaga selama dua puluh lima tahun terakhir ini. Dengan pengolahan yang lebih canggih nilai ekspor Irian bahkan diperkirakan bisa mencapai sepertiga dari anggaran Orde Baru saat ini (hal. 26-27). Wajarlah kiranya jika pada akhirnya proyek pembangunan di KTI lebih banyak bersifat fisik. Kalaupun ada perhatian pada segi sosial hal ini juga lebih sebagai penunjang pembangunan fisik sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosialnya. "Pembangunan" sisi sosial tersebut dapat terlihat pada penambahan pegawai negeri atau pelaksanaan program transmigrasi secara besar-besaran ke daerah KTI.

Pesatnya pembangunan fisik di Irian Jaya tentu menimbulkan ketertarikan penduduk dari luar Irian. Catatan statistik provinsi Irian Jaya memperlihatkan semakin banyaknya jumlah imigran yang datang. Pada tahun 1980 jumlah penduduk kota yang lahir di luar Irian Jaya mencapai angka 30% dari seluruh penduduk perkotaan. Jumlah tersebut terus meningkat dengan pesat hingga pada tahun 1987 jumlah penduduk kota yang lahir di luar Irian Jaya telah meningkat menjadi 65% dari seluruh penduduk yang tinggal di daerah perkotaan (hal 39).

Dari ilustrasi di atas semakin jelas bahwa penduduk Irian Jaya semakin majemuk, terutama di daerah perkotaan. Kemajemukan etnis tersebut menimbulkan potensi terjadinya konflik antar etnik, terutama penduduk pribumi dengan pendatang. Kebudayaan etnik tertentu dapat ditafsirkan secara berbeda oleh kelompok lain. Sementara itu untuk wilayah pedesaan dapat dikatakan masih terdapat homogenitas etnik. Walaupun sesungguhnya mereka tidak terlepas dari kemajemukan berdasarkan perbedaan antara suku-suku asli.

Pembangunan memang amat menyolok di daerah perkotaan, tetapi tidak seimbang dengan daerah pedesaan. Dapat dilihat dari timpangnya pendapatan perkapita penduduk perkotaan dengan penduduk pedesaan. Padahal sebagian besar masyarakat perkotaan adalah penduduk imigran. Memang terdapat kesan bahwa penduduk imigran hanya berminat menetap di daerah yang mempunyai peluang ekonomi sehingga pembangunan yang terjadi pun menjadi pembangunan yang bias kota.

Di samping kekayaan alamnya yang berlimpah KTI juga memiliki budaya tertentu yang seringkali dipandang sebagai budaya yang terbelakang dengan orang-orangnya yang berperadaban rendah. Ada semacam keyakinan yang cukup kuat di kalangan

masyarakat Indonesia bagian Barat bahwa manusia KTI adalah orang-orang yang "terbelakang, miskin, berpengetahuan minim" dan dengan demikian memiliki sumber daya (ekonomis) yang tidak memadai untuk pembangunan

Dalam latar belakang seperti itulah muncul "niat baik" pemerintah untuk mengadakan pembangunan di KTI. Dasar pemikirannya cukup jelas yaitu untuk memperadabkan masyarakat yang masih "terbelakang" dan sekaligus mengembangkan perekonomian yang ada dengan cara mengefisienkan pengolahan sumber-sumber alam yang terpendam. Yang juga tidak bisa dilupakan adalah ideologi "dari Sabang sampai Merauke" yang ada di balik kepala para penyelenggara pembangunan. Dengan ideologi itu pemerintah (baca: orang Jawa) mendapat pembenaran untuk menyamakan dan menyeragamkan segala hal yang berbeda pada kebudayaan KTI demi sebuah modernisasi atau pembangunan. Pembangunan kemudian juga berarti "pem-Barat-an" atau "pen-Jawa-an" unsur-unsur budaya lokal.

Ada sisi-sisi tertentu yang dominan dalam wajah pembangunan KTI. Sisi-sisi itu adalah bias modernisme dan kapitalistik yang berakar pada anggapan bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Kedua hal itu menjadi pasal-pasal wajib dalam rumus pembangunan karena dipercaya menjadi tolok ukur dan penggerak dari jalannya pembangunan itu sendiri. Konsekuensi dari pengutamaan sisi ekonomi dan teknologi ini tentu mengakibatkan terabalkannya pertimbangan-pertimbangan non ekonomi yang penting dalam kehidupan sosial. Pembangunan wilayah perkotaan misalnya, hasilnya lebih dinikmati oleh kelompok-kelompok pendatang dari luar pulau yang lebih jeli membaca peluang ekonomi ketimbang penduduk lokal. Sementara itu aktivitas perdagangan yang oleh penduduk

lokal dimaknai secara lebih mendalam sebagai pertukaran sosial untuk terus-menerus menyeimbangkan alam, harus terukur oleh perdagangan yang hanya mementingkan aspek ekonominya saja.

Dalam pengamatan sekilas pembangunan tampaknya memang menempatkan manusia KTI sebagai subjek pembangunan. Perkembangan pariwisata yang juga bertumpu pada kesenian lokal seolah meletakkan manusia KTI sebagai subjek kebudayaan. Namun ketika kepentingan modal mendominasi wacana pembangunan maka yang muncul adalah pembekuan citra bahwa manusia KTI adalah pemilik kebudayaan eksotik dari masa lalu. Suatu kebudayaan yang unik, langka dan aneh yang berarti juga suatu kebudayaan rendah yang kuno, konservatif, naif dan tidak sesuai lagi dengan tantangan jaman. Sadar atau tidak anggapan bahwa masyarakat KTI adalah masyarakat yang "terbelakang, miskin dan berbudaya rendah" tidak hanya merasuki pemikiran masyarakat Indonesia bagian Barat tetapi juga masyarakat KTI itu sendiri. Ekspos media massa yang terus-menerus menyebarkan gagasan bahwa manusia KTI adalah manusia yang terbelakang, miskin dan berbudaya rendah" lama-kelamaan menjadikan masyarakat KTI percaya, minder dan tidak berdaya karena mereka mengira bahwa memang begitulah keadaan mereka yang sebenarnya, ekspos media massa tersebut menciptakan realitas sosial yang semula hanya berupa gagasan abstrak.¹ (hal. 50).

Ada suatu fenomena menarik yang ada di KTI, fenomena tersebut adalah terjadinya simbiosis mutualisme antara penguasa, pengusaha, dan pemuka agama (cendekiawan) sebagai aktor pembangunan. Sesungguhnya kondisi sosial yang ada memperlihatkan bahwa posisi penguasa-pengusaha-pemuka agama (cendekiawan) tidak hanya sekedar agen dalam pembangunan, posisi

mereka lebih tepat jika dikatakan sebagai agen pembangunanisme. Dikatakan pembangunanisme karena pembangunan yang dijalankan tidak hanya mengoperasikan mekanisme kapitalisme tetapi juga menciptakan hegemoni untuk melumaskan jalannya pembangunan dengan menggunakan perangkat informasi, intelektual dan moral.² Produksi hegemoni oleh kolusi tersebut dimaksudkan untuk memaksimalkan sumber daya alam dan manusia pribumi secara lebih modern (walaupun dalam praktiknya hanya cenderung untuk memaksimalkan sumber daya alam saja).

Harus dipahami juga bahwa posisi penguasa, pengusaha, pemuka agama (cendekiawan) tidak bersifat netral dan bebas dari kepentingan tersembunyi. Baik penguasa, pengusaha maupun pemuka agama (cendekiawan) tidak hanya tampil untuk memperjuangkan kepentingan mereka yang kasat mata, penguasa misalnya, tidak hanya bertindak demi terciptanya suatu pemerintahan yang solid saja tetapi dapat juga bertindak untuk misi agama atau juga kepentingan modal.³ Dalam konteks ini pula

¹lihat Peter L. Berger & Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality* (New York: Penguin Books, 1979). Salah satu tesis buku ini menyatakan bahwa realitas sosial tidak hanya sesuatu yang sudah ada (given) tetapi juga diciptakan (constructed) sendiri oleh manusia

²Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 70 - 74

³yang tampaknya mesti dicermati secara lebih seksama adalah kepentingan kapital yang saat ini tampaknya tidak bisa dipisahkan dari tubuh angkatan ABRI, hal ini mengingat bahwa ABRI memiliki 66 perseroan terbatas (26 AD, 18 AU, 15 AL dan 7 Kepolisian) yang mau tidak mau menuntut kelanggan keuntungan dan stabilitas; lihat *The Jakarta Post*, 1 Oktober 1995

tindakan-tindakan penguasa, pengusaha maupun pemuka agama (cendekiawan) mesti dipahami, yaitu apakah sesungguhnya tindakan mereka menyembunyikan kepentingan tertentu atau tidak.

"Bersembunyiya" kepentingan-kepentingan tertentu yang melatari tindakan penguasa, pengusaha atau pemuka agama (cendekiawan) memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan militer dalam menjaga keamanan KTI. Selama ini militer selalu mereproduksi gagasan bahwa KTI merupakan salah satu tempat yang rawan dan potensial untuk berkembangnya gerakan-gerakan separatis, gagasan tentang gerakan separatis (yang sering disebut sebagai GPK -Gerakan Pengacau Keamanan) selalu diulang-ulang untuk menamai gejala yang mengganggu stabilitas. Selain itu militer juga tidak beralih pada pendekatan yang lebih bersifat teritorial atau budaya, di KTI militer masih saja menggunakan pendekatan keamanan. Hal itu terlihat dari fakta bahwa para pemegang jabatan teritorial sebelumnya adalah pemegang jabatan-jabatan tempur (hal134-136), fakta yang sekaligus mengesankan adanya logika bahwa seorang pemegang jabatan teritorial haruslah mengetahui daerah-daerah yang "rawan" dan sekaligus juga mengenal secara persis cara-cara bertempur yang baik.

Untuk mendorong pembangunan di daerah KTI pemerintah mencanangkan sebuah kebijakan yang lazim disebut "Program KTI", yang kadang-kadang juga disebut Go East Policy. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik investasi sebanyak-banyaknya dengan asumsi bahwa dengan masuknya investor-investor ke daerah ini, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh dengan baik. Dari segi ekonomi barangkali kebijakan tersebut memang sudah tepat, namun apakah kebijakan tersebut juga tepat jika dipandang dari sisi budaya atau sosial? apakah akibat buruk

penetrasi ekonomi terhadap kehidupan sosial harus diteruskan?

Tampaknya memang harus ada perubahan paradigma pembangunan jika pembangunan memang hendak memashalahkan masyarakat dan meniadakan akibat buruknya. Paradigma itu tentunya tidak menalar pembangunan semata-mata dari keuntungan ekonomis semata, namun pada seberapa besar penderitaan yang ditanggung umat manusia untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomis tertentu?⁴ Apalagi jika mengingat bahwa sesungguhnya kemajuan yang dicapai oleh pembangunan tidak dapat diverifikasi secara empiris.⁵ Sejalan dengan gagasan itu tampaknya memang diperlukan suatu pola pembangunan yang sedemokratis dan seterbuka mungkin serta didukung oleh setiap individu dan komunitas yang ada di dalamnya, pola yang demikian diharapkan dapat menimbulkan penghormatan pada keanekaragaman budaya (hal. 140).

Hal ini sejalan dengan seruan Crocker untuk kembali pada studi tentang etika pembangunan. Menurut Crocker kejadian-kejadian sosial yang muncul sesungguhnya terjadi akibat kebijakan pembangunan itu sendiri. Karenanya diperlukan suatu refleksi moral dan sikap kritis terhadap tujuan dan cara pembangunan dilaksanakan.⁶ Sehingga pada akhirnya yang terjadi bukan pihak yang "kaya" dengan segala "kekuasaan" dan "kekuatan" yang mereka miliki akan berusaha mempertahankan "kelainan" mereka. Tetapi, bagaimana mengusahakan terciptanya masyarakat yang

⁴lihat Peter L. Berger, Brigitte Berger & Hansfried Kellner, *The Homeless Mind*, (New York: Vintage Books, 1974) hal. 7

⁵Ibid hal. 4

⁶lihat D. Crocker, *Toward Development Ethics*, dalam *World Development*, 19, hal. 457-483.

saling memanusiakan satu dengan lainnya.

Secara singkat dapat dirumuskan bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang membebaskan manusia (baik dari segi ekonomi, politik, dan budaya). Yaitu pembangunan yang memperhatikan dialektika antara pengejaran target

ekonomi dengan nilai-nilai moral, dan diletakkan dalam kerangka sistem politik yang demokratis.⁷ Selain itu juga tercipta diskusi publik yang tidak terbatas dalam memecahkan persoalan kemasyarakatan. Sehingga kebijakan yang diambil merupakan hasil terbaik dari pertimbangan banyak hal. ●

A. Gandung Indarto

⁷lihat Heru Nugroho, Kritik Habermas Terhadap Postmodernisme dan Relevansinya bagi Pemahaman Pembangunan, dalam Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan (Yogyakarta: UII Press, 1997) hal. 105.